

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	15
B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.....	18
C. Struktur Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.....	10
<b>BAB III   TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Negara Hukum.....	22
B. Pembatasan Kekuasaan.....	28
C. Pemerintah Daerah.....	37
D. Kepala Daerah.....	42
F. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota..... 53
- B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan Pasal 91 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014..... 60

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran..... 63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**